

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Regional

2.1.1 Pengertian Ilmu Ekonomi Regional

Pengertian ekonomi diyakini berasal dari kata *oikonomia*. *Oikonomia* berasal dari dua kata Bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan atau mengatur. Dari penjelasan tersebut *oikonomia* dapat diartikan mengatur kebutuhan dalam suatu rumah tangga. Kemudian menurut KBBI, ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, konsumsi barang, tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan.

Ilmu ekonomi dapat digolongkan ke dalam bidang studi ilmu sosial bersama dengan antropologi, arkeologi, geografi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu-ilmu tersebut dalam praktiknya memiliki percabangan ilmu. Cabang-cabang ilmu ini pada umumnya memiliki karakteristik yang unik (dapat berupa gabungan dari beberapa ilmu) dan spesifik, namun tetap dalam koridor ilmu yang bersangkutan. Ilmu ekonomi, sebagaimana kondisi tersebut, juga memiliki cabang-cabang ilmu spesifik seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi perpajakan, ekonometrika, dan ekonomi regional.

Ilmu Ekonomi Regional atau dapat disebut juga dengan Ilmu Ekonomi Wilayah. Ilmu ekonomi regional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang membahas perbedaan potensi pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Ilmu ekonomi regional kurang sesuai kaitannya dengan ilmu lainnya, salah satunya yaitu geografi ekonomi (*economic geography*). Geografi ekonomi merupakan ilmu yang pembahasannya mencakup bagaimana reaksi suatu wilayah jika ada kegiatan di sekitar wilayah tersebut. Geografi ekonomi memiliki prinsip yang dapat dipakai oleh pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan ruang agar efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Ilmu Ekonomi Regional

Sebagai cabang ilmu ekonomi, pada dasarnya ekonomi regional memiliki tujuan (*goals*) yang tidak berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Ferguson (1965, dikutip dalam Tarigan, 2005) mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah (1) *full employment*, (2) *economic growth*, dan (3) *price stability*. Uraian atas masing-masing tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) mewujudkan *full employment*, sebuah wilayah yang memiliki tingkat pengangguran yang rendah memberikan gambaran bahwa perekonomian di wilayah tersebut telah memanfaatkan sumber daya manusia dengan cara yang efektif dan efisien. Dapat disimpulkan jika sebuah wilayah ingin

memiliki pendapatan yang semakin banyak maka perekonomian wilayah tersebut harus dikelola dengan cara yang lebih efektif dan efisien;

- 2) adanya *economic growth* yang dapat menggambarkan bahwa kualitas ekonomi pada suatu wilayah terjadi peningkatan Δ relatif positif. Jika suatu wilayah ingin memiliki standar kualitas hidup yang tinggi maka cara yang digunakan adalah meningkatkan kualitas ekonomi; dan
- 3) terciptanya *price stability*, agar kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut dapat tercukupi dengan terciptanya kestabilan harga suatu komoditas.

Kemudian manfaat pada ekonomi regional dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu, manfaat secara mikro dan manfaat secara makro. Contoh manfaat secara mikro yaitu Ilmu ekonomi regional dapat membantu perencana wilayah dalam menentukan di bagian wilayah mana suatu kegiatan atau proyek sebaiknya dilaksanakan, tetapi tidak sampai menunjuk ke lokasi konkret dari proyek tersebut. Namun analisis ilmu ekonomi regional membutuhkan biaya yang Δ relative murah karena dalam banyak hal cukup menggunakan data sekunder. Oleh karena itu, ilmu ekonomi regional dapat membantu perencana wilayah untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses memilih lokasi.

Manfaat secara makro diantaranya yaitu dapat membantu pemerintah untuk menentukan sektor ekonomi manakah yang menjadi unggulan dari suatu wilayah. Cara tersebut dapat menambah efisiensi pemerintah untuk menentukan titik fokus dalam menggunakan anggaran untuk mengembangkan sektor unggulan pada wilayah tersebut. Apabila optimalisasi ini dapat berjalan dengan baik, besar

kemungkinan jumlah pendapatan daerah akan meningkat dan akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi sektor ekonomi nonunggulan.

2.1.3 Sejarah dan Perkembangan Ilmu Ekonomi Regional di Indonesia

Perkembangan ilmu ekonomi regional di Indonesia dimulai pada tahun 1970. Pemerintah Indonesia pada masa itu menyadari bahwa pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi daerah dapat menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa. Ilmu ekonomi regional yang dinilai dapat menjadi alat analisis dalam membangun perekonomian suatu wilayah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih mengembangkan ilmu ekonomi regional dengan diterapkannya ilmu tersebut pada mata kuliah di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia ingin terus mengembangkan ilmu regional yang diharapkan agar dapat membantu masalah perekonomian di Indonesia kedepannya.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto atau dapat disingkat dengan PDRB merupakan salah satu indikator perekonomian yang dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Indikator ini menggambarkan kemampuan dari suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah dari berbagai sektor dalam rentang waktu tertentu. Terdapat dua pendekatan yang digunakan oleh BPS dalam menyusun PDRB ini, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran.

Menurut BPS Kota Tangerang Selatan (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa pada suatu wilayah yang disebabkan oleh berbagai kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut. Kemudian dalam penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disediakan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pada 2010 klasifikasi dalam PDRB mengalami perubahan, yang sebelumnya memiliki 9 klasifikasi lapangan usaha berubah menjadi 17 klasifikasi lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1.) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori ini termasuk dalam kegiatan ekonomi yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia pada wilayah tersebut. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup individu maupun untuk dijadikan usaha dengan cara dijual kepada pihak lain.
- 2.) Pertambangan dan Penggalan. Dikelompokkan dalam empat subkategori yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi; pertambangan batubara dan lignit; pertambangan biji logam; dan pertambangan dan penggalan lainnya meliputi pengambilan segala jenis batu-batuan, pasir, tanah termasuk komoditas garam hasil galian.
- 3.) Industri Pengolahan. Meliputi kegiatan ekonomi untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk yang berasal dari SDA ataupun hasil dari pertambangan. Produk baru hasil pengolahan tersebut dapat

di ekspor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada wilayah tertentu.

- 4.) Pengadaan Listrik dan Gas. Meliputi dua subkategori ketenagalistrikan; pengadaan gas dan produksi es. Meliputi kegiatan ekonomi berupa kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, udara dingin, produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.
- 5.) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Mencakup kegiatan ekonomi yang keterkaitan dengan pengolahan limbah/sampah yang dapat mencemari lingkungan, kemudian hasil dari pengolahan menjadi input dalam proses produksi lainnya.
- 6.) Konstruksi. Mencakup kegiatan usaha berupa pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, dan juga konstruksi bersifat sementara.
- 7.) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Mencakup kegiatan usaha berupa penjualan besar maupun eceran dan reparasi kendaraan.
- 8.) Transportasi dan Pergudangan. Mencakup beberapa kegiatan seperti angkutan rel; angkutan darat; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir.

- 9.) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Terdiri dari penyediaan akomodasi jangka pendek seperti penginapan serta penyediaan makan minum. Makan dan minum yang dimaksud adalah jenis usaha kuliner seperti restaurant dan tempat makan lainnya.
- 10.) Informasi dan Komunikasi. Mencakup kegiatan seperti informasi, teknologi informasi serta data atau kegiatan komunikasi
- 11.) Jasa Keuangan dan Asuransi. Mencakup kegiatan jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya, serta jasa penunjang keuangan.
- 12.) Real Estat. Mencakup kegiatan ekonomi berupa penyediaan real estat yang dapat dilakukan atas milik sendiri maupun orang lain.
- 13.) Jasa Perusahaan. Meliputi kegiatan ekonomi berupa jasa persewaan dan sewa guna usaha, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung, jasa administrasi dan jasa penunjang kantor; dan usaha lainnya.
- 14.) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Kegiatan yang bersifat pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang segala administrasi dalam pemerintahan.
- 15.) Jasa Pendidikan. Kegiatan yang menunjang pendidikan pada wilayah tersebut yang mencakup tenaga pendidikan, dan sarana pada sektor pendidikan

- 16.) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kegiatan yang bertujuan untuk menunjang sektor kesehatan maupun sektor social yang mencakup tenaga kesehatan professional di fasilitas kesehatan maupun di kegiatan sosial.
- 17.) Jasa lainnya. Kegiatan yang meliputi 4 subkategori, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi computer, barang keperluan pribadi, dan perlengkapan rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri atau memenuhi kebutuhan; dan jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional.

2.3 Sektor Unggulan pada Perekonomian Daerah

Sektor unggulan merupakan sebuah sektor yang dapat mendorong tingkat perekonomian dan kesejahteraan di suatu daerah melalui kegiatan produksi, ekspor dan membuka lapangan pekerjaan. Sektor unggulan dapat diketahui beberapa tehnik yaitu analisis *location quotient* (LQ), analisis *shift share* dan analisis model rasio pertumbuhan. Tujuan dari mencari sektor unggulan di suatu daerah adalah untuk menentukan prioritas rencana pembangunan di daerah tersebut.

2.4 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *location quotient* merupakan salah satu metode untuk mencari sektor unggulan suatu daerah Menurut Tarigan (2005), LQ merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor unggulan dan sektor nonunggulan pada suatu wilayah dengan cara melakukan perbandingan terhadap besarnya

peranan sektor tersebut secara nasional (atau dalam lingkup wilayah administrasi yang satu tingkat lebih tinggi dari objek wilayah). Pada umumnya analisis LQ digunakan untuk mencari perbandingan dari data nasional dengan data regional. Konsep cara penghitungannya dengan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n} = \frac{Y_{ij}/Y_j}{Y_{in}/Y_n}$$

Keterangan:

LQ = Location Quotient

E = Jumlah tenaga kerja

Y = Jumlah output atau pendapatan atau PDB atau PDRB

i = Sektor tertentu

j = Kota atau daerah tertentu

n = Daerah yang lebih luas misalnya provinsi atau nasional

Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut dapat dibagi berdasarkan dua kondisi dengan interpretasinya masing-masing, yaitu:

- 1.) $LQ > 1$, maka sektor i merupakan sektor basis.
- 2.) $LQ \leq 1$, maka sektor i merupakan sektor nonbasis.

Jika hasil dari perhitungan akan diperoleh nilai $LQ > 1$ artinya sektor tersebut merupakan sektor basis. Hal ini menunjukkan produksi barang atau jasa

sektor tertentu di daerah studi lebih besar dari daerah referensi/pembanding dan barang atau jasa sektor tersebut dapat dijadikan komoditas ekspor. $LQ \leq 1$ artinya sektor tersebut bukan merupakan sektor basis. Hal ini menunjukkan produksi barang atau jasa sektor tertentu daerah studi sama dengan atau lebih kecil dari daerah referensi/pembanding dan barang atau jasa sektor tertentu hanya untuk konsumsi daerah sendiri.

2.5 Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* berfungsi untuk membandingkan perubahan kegiatan ekonomi suatu daerah dengan perubahan kegiatan ekonomi daerah lain. Dalam analisis ini, diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi awal perhitungan adalah sama. Analisis ini menyatakan adanya perbedaan dan kesamaan antar wilayah (Daryanto & Hafizrianda, 2010).

Analisis *shift share* (D_{ij}) mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berhubungan satu sama lainnya yaitu *national share* (N_{ij}), *proportional shift* (M_{ij}), dan *differential shift* (C_{ij}).

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

1) National Share (N_{ij})

National Share adalah indikator bagaimana pertumbuhan ekonomi wilayah yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tingkat lebih tinggi (nasional/provinsi). Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

Keterangan :

N_{ij} = National share

E_{ij} = PDRB sektor kabupaten tahun awal

r_n = pertumbuhan PDRB total provinsi selama periode

2) Proportional Shift (M_{ij})

Proporsional Shift adalah perubahan proposional kinerja suatu sektor di wilayah (kabupaten) terhadap wilayah yang lebih tinggi (provinsi). *Proporsional Shift* dirumuskan sebagai berikut:

$$M_{ij} = E_{ij} \times (r_{in} - r_n)$$

Keterangan :

M_{ij} = Proporsional Shift

E_{ij} = PDRB sektor kabupaten tahun awal

r_{in} = pertumbuhan sektor x provinsi selama periode

r_n = pertumbuhan PDRB total provinsi selama periode

3) Differential Shift (C_{ij})

Differential shift adalah indikator yang menggambarkan daya saing sektor perekonomian daerah atau kabupaten dengan perekonomian yang ada di tingkat

lebih atas atau provinsi. Perhitungan *Differential Shift* diformulasikan melalui rumusan berikut:

$$C_{ij} = E_{ij} \times (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

C_{ij} = Differential Shift

E_{ij} = PDRB sektor kabupaten tahun awal

r_{ij} = pertumbuhan sektor x kabupaten selama periode

r_{in} = pertumbuhan sektor x provinsi selama periode

Dari hasil perhitungan pada komponen-komponen tersebut, kemudian dapat pula ditentukan Shift Netto. Shift Netto adalah hasil penjumlahan dari proporsional shift dan Differential shift. Untuk menghitung komponen ini, dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SN_{ij} = M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan : SN_{ij} = Shift netto sektor i di wilayah j

M_{ij} = Nilai proporsional shift sektor i di wilayah j

C_{ij} = Nilai differential shift sektor i di wilayah j

Berdasarkan hasil perhitungan pada formula tersebut, jika nilai shift netto sektor $i > 0$, dapat diartikan bahwa pertumbuhan sektor i di wilayah j bertumbuh

secara progresif atau tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor i di wilayah n (perbandingan), demikian pula sebaliknya.

2.6 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Menurut Yusuf (1999), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan analisis yang membandingkan pertumbuhan sektor perekonomian suatu daerah dengan skala yang lebih luas atau dengan daerah yang berskala lebih kecil. MRP dapat dikatakan sebuah analisis yang berasal dari analisis *shift share* yang telah dimodifikasi. Hasil modifikasi tersebut menghasilkan penyederhanaan konsep *shift share* menjadi dua jenis rasio yaitu rasio perbandingan pertumbuhan yaitu rasio pertumbuhan daerah studi (RPs) dan rasio pertumbuhan daerah referensi (RPr). Kedua rasio tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rasio pertumbuhan wilayah studi (yang disimbolkan dengan RPs) merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i di wilayah j (wilayah studi) dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di wilayah n (wilayah referensi).

Untuk menghitung rasio ini, dapat digunakan rumus berikut.

$$RP_S = \frac{(\bar{E}_{ij} - E_{ij}) / E_{ij}}{(\bar{E}_{in} - E_{in}) / E_{in}}$$

Keterangan:

RP_S	=	Rasio pertumbuhan wilayah studi
E_{ij}	=	Nilai PDRB sektor i di daerah j di tahun awal analisis
\bar{E}_{ij}	=	Nilai PDRB sektor i di daerah j di tahun akhir analisis
E_{in}	=	Nilai PDRB sektor i di daerah n di tahun awal analisis
\bar{E}_{in}	=	Nilai PDRB sektor i di daerah n di tahun akhir analisis

Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut dapat dibagi berdasarkan dua kondisi dengan interpretasinya masing-masing, yaitu:

- a) $RP_S < 1$, maka tingkat pertumbuhan sektor i di wilayah j lebih rendah daripada pertumbuhan sektor i di wilayah n.
 - b) $RP_S > 1$, maka tingkat pertumbuhan sektor i di wilayah j lebih tinggi daripada pertumbuhan sektor i di wilayah n.
- 2) Rasio pertumbuhan wilayah referensi (yang disimbolkan dengan RP_R) merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i di

wilayah n (wilayah referensi) dengan laju pertumbuhan total wilayah n.

Untuk menghitung rasio ini, dapat digunakan rumus berikut.

$$RP_R = \frac{(\bar{E}_{in} - E_{in}) / E_{in}}{(\bar{E}_n - E_n) / E_n}$$

Keterangan:

RP_R = Rasio pertumbuhan wilayah referensi

E_{in} = Nilai PDRB sektor i di daerah n di tahun awal analisis

\bar{E}_{in} = Nilai PDRB sektor i di daerah n di tahun akhir analisis

E_n = Total PDRB di daerah n di tahun awal analisis

\bar{E}_n = Total PDRB di daerah n di tahun akhir analisis

Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut dapat dibagi berdasarkan dua kondisi dengan interpretasinya masing-masing, yaitu:

- a) $RP_R < 1$, maka tingkat pertumbuhan sektor i di wilayah n lebih rendah daripada pertumbuhan total wilayah n .
- b) $RP_R > 1$, maka tingkat pertumbuhan sektor i di wilayah n lebih rendah daripada pertumbuhan total wilayah n .

Dari hasil perhitungan analisis MRP ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori dengan kriteria masing-masing, sebagai berikut:

- 1) Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai kategori 1 apabila memiliki Kriteria $RP_s +$ dan kriteria $RPr +$ maka menunjukkan kegiatan ekonomi sektor tertentu ditingkat daerah studi dan ditingkat daerah referensi/pembanding mempunyai pertumbuhan yang dominan.
- 2) Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai kategori 2 apabila memiliki Kriteria $RP_s +$ dan kriteria $RPr -$ maka menunjukkan kegiatan ekonomi sektor tertentu ditingkat daerah studi mempunyai pertumbuhan yang dominan, namun ditingkat daerah referensi/pembanding mempunyai pertumbuhan yang belum dominan. Kegiatan ekonomi sektor ini merupakan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah studi.
- 3) Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai kategori 3 apabila memiliki Kriteria $RP_s -$ dan kriteria $RPr +$ maka menunjukkan kegiatan ekonomi sektor tertentu ditingkat daerah studi mempunyai

pertumbuhan yang belum dominan, ditingkat daerah referensi/pembanding mempunyai pertumbuhan yang dominan.

- 4) Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai kategori 4 apabila memiliki Kriteria RPs - dan kriteria RPr – maka menunjukkan kegiatan ekonomi sektor tertentu ditingkat daerah studi dan ditingkat daerah referensi/pembanding mempunyai pertumbuhan yang belum dominan.